



MAKALAH

Konstitusi Indonesia dan Perubahan UUD 1945

Pengantar Hukum Indonesia

Kelompok 5
Hukum Keluarga Islam · Fakultas Syari'ah · UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon · 2026



Kerangka Pembahasan

Tiga fokus utama makalah dan alur presentasi

01

Pembukaan UUD 1945

Kedudukan, sejarah perumusan, nilai, fungsi, dan implikasi dalam sistem ketatanegaraan.

02

Perubahan UUD 1945

Mekanisme amandemen, dampak Reformasi 1999–2002, dan implikasi kelembagaan.

03

Arti, Nilai, dan Sifat Konstitusi

Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi serta pedoman praktik kenegaraan.

UUD 1945

Dasar hukum tertinggi, sumber nilai konstitusional, dan pedoman penyelenggaraan negara.

Filosofis · Normatif · Demokratis

Latar Belakang

Konstitusi sebagai fondasi sistem ketatanegaraan Indonesia

KONTEKS UTAMA

- 1 UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2 Pembentukannya berakar pada perjuangan kemerdekaan dan forum BPUPKI-PPKI tahun 1945.
- 3 Reformasi 1998 mendorong amandemen untuk memperkuat demokrasi, HAM, dan akuntabilitas.

Isu pokok: bagaimana konstitusi menjaga kontinuitas nilai dasar negara sekaligus beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial.



Rumusan Masalah dan Tujuan

Pertanyaan penelitian yang mengarahkan struktur makalah

RUMUSAN MASALAH

- 1 Apa fungsi dan makna Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan bernegara?
- 2 Bagaimana prosedur dan sejarah perubahan UUD 1945 serta peran lembaga terkait?
- 3 Apa arti, nilai, dan sifat konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi negara Indonesia?

TUJUAN PENULISAN

- 1 Menjelaskan Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
- 2 Menguraikan prosedur perubahan UUD 1945, sejarah amandemen, dan peran lembaga konstitusional.
- 3 Menjelaskan arti, nilai, dan sifat konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Rumusan dan tujuan menjaga fokus pembahasan pada hubungan antara nilai dasar konstitusi, mekanisme perubahan, dan praktik penyelenggaraan negara.

Pembukaan UUD 1945

Dasar filosofis, normatif, historis, dan sosiologis negara

Pembukaan UUD 1945

staatstidee
ide dasar negara

Kedudukan

Bagian integral UUD 1945; menjadi sumber inspirasi dan interpretasi konstitusi.

Sejarah

Dirumuskan melalui BPUPKI, Panitia Sembilan, Piagam Jakarta, dan disahkan PPKI.

Nilai

Memuat nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Fungsi

Menjadi pondasi filosofis, sumber normatif, legitimasi historis, dan identitas sosial.

Sejarah Perumusan Pembukaan

Dari forum persiapan kemerdekaan menuju konstitusi negara

29 Mei–1 Juni 1945



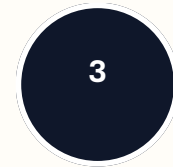
BPUPKI membahas dasar negara

22 Juni 1945



Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta

18 Agustus 1945

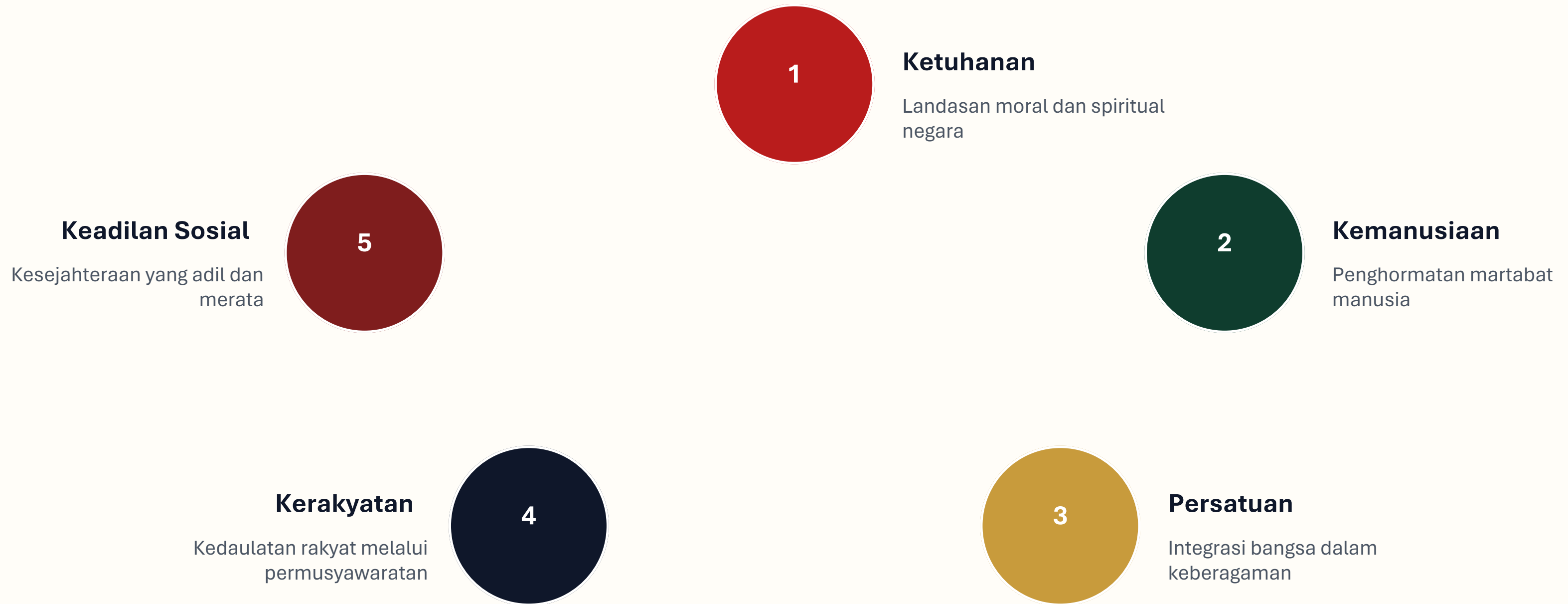


PPKI mengesahkan UUD 1945

Makna proses: Pembukaan UUD 1945 lahir dari musyawarah dan konsensus yang merepresentasikan keberagaman aspirasi rakyat Indonesia.

Nilai-Nilai Pembukaan UUD 1945

Lima nilai dasar sebagai constitutional value system



Nilai-nilai Pembukaan menjadi sumber arah bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Fungsi dan Implikasi Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 sebagai kompas praktik ketatanegaraan

Filosofis

Pondasi nilai dan command moral penyelenggara negara.

Normatif

Sumber interpretasi norma hukum dan pasal konstitusi.

Historis

Legitimasi moral atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Sosiologis

Identitas nasional serta aspirasi kolektif rakyat.

IMPLIKASI PRAKTIK

Landasan HAM • Dasar kebijakan publik • Interpretasi yudisial • Pendidikan konstitusi

Perubahan UUD 1945

Respons terhadap kebutuhan demokratisasi pasca-Reformasi

Mengapa perlu diubah?

- Teks asli belum memadai untuk dinamika politik dan sosial era Reformasi.
- Dominasi eksekutif pada masa Orde Baru perlu dikoreksi.
- Perlindungan HAM dan checks and balances harus diperkuat.

Amandemen dilakukan 4 kali pada 1999–2002 untuk memperkuat demokrasi, akuntabilitas, dan struktur kelembagaan negara.

Mekanisme Perubahan UUD 1945

Pasal 37 UUD 1945 dan karakter rigid-fleksibel



Rigid secara prosedural: membutuhkan tata cara formal ketat. Fleksibel secara substansi: dapat menyesuaikan kebutuhan zaman melalui amandemen dan interpretasi.

Dampak Amendemen 1999–2002

Modernisasi struktur ketatanegaraan Indonesia

1

Penguatan lembaga negara

Kemandirian legislatif dan yudikatif; pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

2

Perlindungan HAM

Hak politik, kebebasan beragama, pendidikan, dan jaminan perlindungan hukum diperluas.

3

Pemilihan presiden langsung

Masa jabatan dibatasi dan prinsip checks and balances ditegaskan.

4

Pengawal konstitusi

MK memastikan norma dan perubahan berjalan sesuai prinsip dasar negara.

Amandemen bukan sekadar perubahan teks, tetapi pembaruan tata kelola kekuasaan negara.

Arti, Nilai, dan Sifat Konstitusi

Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dan pembatas kekuasaan

Arti

Aturan dasar tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hubungan lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

Dicey: membatasi kekuasaan pemerintah.
Schmitt: menentukan pembagian kekuasaan dan keputusan formal.

NILAI KONSTITUSI

- Hukum: supremasi dan kepastian hukum
- Politik: legitimasi dan checks and balances
- Sosial: hak, kewajiban, dan kesejahteraan
- Budaya-filosofis: Pancasila dan cita kemerdekaan

SIFAT KONSTITUSI

- Tertulis
- Fundamental
- Mengikat
- Rigid dan fleksibel
- Dinamis

UUD 1945 bukan hanya dokumen hukum, tetapi fondasi moral, politik, sosial, dan budaya bangsa.

Implikasi dalam Praktik Ketatanegaraan

Konstitusi bekerja melalui kebijakan, hukum, pendidikan, dan stabilitas demokrasi

Kebijakan Publik

Acuan agar kebijakan sesuai tujuan negara dan melindungi hak warga.

Penegakan Hukum

Dasar yuridis pembentukan peraturan serta pengawasan konstitusional.



**PRAKTIK
KONSTITUSI**

Pendidikan Kewarganegaraan

Membentuk warga negara sadar hukum dan aktif secara politik.

Stabilitas Demokrasi

Menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kesimpulan

Tiga simpulan pokok dari pembahasan makalah

Pembukaan UUD 1945

Berperan sebagai dasar filosofis, moral, dan hukum negara; nilai Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan negara.

Perubahan UUD 1945

Empat amandemen pasca-Reformasi memperkuat lembaga negara, HAM, pemilihan presiden langsung, dan checks and balances.

Konstitusi sebagai fondasi negara

UUD 1945 menjadi fondasi moral, politik, sosial, dan budaya untuk negara yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

Inti presentasi: konstitusi menjaga kesinambungan nilai dasar negara sekaligus memungkinkan pembaruan kelembagaan sesuai kebutuhan demokrasi modern.



Terima Kasih

Diskusi dan tanya jawab

Kelompok 5 · Hukum Keluarga Islam · Fakultas Syari'ah